



PROSIDING

Konferensi Nasional Komunikasi

Konstruksi Media Republika *On-line* terhadap Pidato Pelantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Izzatul Muslimah

Magister Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro

Jl. Trajutrismo Raya 109 B, Semarang 50141, Indonesia

risa_spensaa@yahoo.com

Abstract

On October 17, 2017 ago Anies Baswedan has inaugurated officially by Joko Widodo as President. He did turn into Governor in DKI Jakarta covering the period 2017-2022. In Anies inaugurated speech, he mentioned a word “pribumi” and afterwards in the next day trigger Barisan Muda Indonesia practice as PDIP party Organization made a return Anies to Police Force Polda Metro Jaya because he considered breach the President Instruction number 26 1998. It does consist avoidance using a word “pribumi” and “non pribumi” while implement the policy, planning the program, implement the government. Many mass-media broke the news that Anies did not proper using a word “pribumi” in his speech, viceversa there are mass-media that support Anies in this case because he did not consider discredit certain ethnic but then had an eye to said metaphorically. This study examine how has mass-media Republika Online encase news of Anies speech as Governor in DKI Jakarta during 2017-2022. This essay used method qualitative descriptive with analysis technique framing Entman model. This paper, thus Republika Online attempt to encase Anies speech was controversial did not breach and did not contain a discrimination SARA in certain ethnic. Argumentation-baked by Hidayat Nur Wahid, ACTA and PWNU, Jusuf Kalla, Luhut, Jimly, and Agus. Framing analysis on Republika Online attempt to be in Anies party.

Keyword : framing analysis, online media, politic, Anies, pribumi

Abstrak

Pada tanggal 17 Oktober 2017 lalu, Anies Baswedan telah resmi dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Gubernur DKI Jakarta Periode Tahun 2017-2022. Dalam pidato pelatikkannya, Anies sempat menyebutkan kata ‘Pribumi’ yang kemudian di keesokan harinya memicu Barisan Muda Indonesia (BMI) yakni organisasi sayap Partai PDI-P melaporkan Anies ke Kepolisian Polda Metro Jaya karena dianggap melanggar Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 yang berisi larangan penggunaan kata pribumi dan non pribumi dalam penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, hingga

penyelenggaraan pemerintah. Banyak media massa yang memberitakan tidak sepatutnya Anies menggunakan kata ‘Pribumi’. Namun ada juga media massa yang masih mendukung Anies dalam polemik ini karena dianggap tidak dalam rangka mendeskreditkan etnis tertentu melainkan hanya metafora saja. Penelitian ini hendak membahas bagaimana media massa *Republika online* dalam melakukan pembingkai terhadap berita polemik pidato ‘Pribumi’ Anies selaku Gubernur DKI Jakarta 2017-2022. Metode yang digunakan, penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik analisis *framing* model Entman. Temuan yang didapatkan adalah *Republika online* mencoba membingkai realitas kontroversi pidato Anies bukanlah suatu pelanggaran hukum dan tidak ada unsur diskriminasi SARA terhadap etnis tertentu. Dikuatkan dengan dukungan Hidayat Nur Wahid, ACTA dan PWNU, Jusuf Kalla, Luhut, Jimly, dan Agus. Analisis *framing* *Republika Online* mencoba mengangkat realitas, menonjolkan realitas yang mendukung pihak Anies.

Keyword : analisis framing, media online, politik, Anies, pribumi

Copyright © 2017 Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. All rights reserved

Pendahuluan

Pada tanggal 17 Oktober 2017 lalu, Anies Baswedan telah resmi dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta Periode Tahun 2017-2022. Dalam pidato pelantikannya, Anies menyebutkan kata ‘Pribumi’ yang kemudian di keesokan harinya memicu Barisan Muda Indonesia (BMI) yang merupakan organisasi sayap PDI-P melaporkan Anies ke Kepolisian Polda Metro Jaya karena dianggap melanggar Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 yang berisi larangan menggunakan kata pribumi dan non pribumi dalam penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, hingga penyelenggaraan pemerintah.

Kata ‘Pribumi’ dianggap sebagai bentuk diskriminasi dan SARA kepada kaum etnis tertentu. Anies pun banyak mendapat kecaman karena dianggap telah menuai kontroversi dalam pidatonya. Ada yang menganggap bahwa tak seharusnya dalam pidato pelantikan Gubernur DKI Jakarta, Anies menyebutkan kata ‘Pribumi’ dalam pidatonya dan berpidato seperti pidato politik. Karena lazimnya pidato pelantikan Gubernur itu membahas bagaimana rencana realisasi program Gubernur yang baru dalam masa jabatannya ke depan.

Banyak media massa yang memberitakan bahwa Anies tidak sepatutnya menggunakan kata ‘Pribumi’ karena sebagai pemimpin baru Gubernur DKI harusnya Anies menghargai semua etnis di Jakarta. Namun ada juga media massa yang masih mendukung Anies dalam polemik ‘Pribumi’ ini karena dianggap Anies tidak dalam rangka mendeskreditkan etnis tertentu melainkan kata ‘Pribumi’ hanya metafora saja.

Penelitian ini hendak membahas bagaimana *Republika online* dalam melakukan pembingkai (*framing*) terhadap berita polemik pidato ‘Pribumi’ Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta 2017-2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah : 1) Bagaimana penulis berita tersebut mendefinisikan masalah dari isu yang ditonjolkan? 2) Apakah sumber masalahnya dari isu yang ditonjolkan? 3) Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah dari isu yang ditonjolkan? 4) Dan Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah atau isu tersebut?

Kerangka Teoritis

Menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckman, realitas adalah hasil ciptaan manusia.

Realitas sosial adalah konstruksi sosial yang diciptakan individu. Sehingga individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi sesuai dengan kehendaknya (Berger dan Luckman, 1990). Kebenaran adalah hal yang nisbi karena hanya berlaku sesuai dengan konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelakunya (Hidayat, 1999).

Konstruksi sosial atas realitas dapat didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif (Poloma, 1994). Asumsinya, pertama, realitas merupakan proses kreatif ciptaan manusia, kedua, hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial tempat pemikiran itu timbul, bersifat berkembang dan dilembagakan. Ketiga, kehidupan masyarakat itu dikonstruksi secara terus menerus (Berger dan Luckman, 1990).

Dalam proses pembuatan berita di media massa, penulis dan editor melakukan sebuah konstruksi sosial terhadap suatu realitas. Media massa kini memiliki peranan yang aktif dalam membingkai suatu realitas. Ada dua pandangan dalam melihat realitas dalam suatu media. Pertama, media secara aktif membingkai suatu realitas. Dan kedua, media pasif dalam membingkai realitas dan berupaya menyampaikan realitas secara apa adanya.

Analisis Framing

Analisis framing adalah varian akhir dari pendekatan analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks. Framing pada awalnya dimaknai sebagai struktur konseptual yang mengorganisasi pandangan politik, kebijakan ataupun suatu wacana yang dibarengi penyediaan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Dalam ilmu komunikasi, konsep framing digunakan untuk

menggambarkan proses penyeleksian dan penyorotan aspek-aspek khusus sebuah realita oleh media. (Sobur, 2004)

Menurut Eriyanto (2011) analisis framing adalah cara media (wartawan) ketika melakukan seleksi terhadap isu dan menulis berita. Cara media (wartawan) ini menentukan realitas fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan atau bahkan dihilangkan serta diarahkan kemana berita itu akan ditulis.

Model analisis ini juga dikembangkan oleh Robert Entman dengan empat tahapan. Pertama, mengidentifikasi masalah yaitu peristiwa dilihat sebagai apa dengan nilai positif atau negative seperti apa. Kedua, identifikasi penyebab masalah yaitu siapa yang dianggap penyebab masalah. Ketiga, evaluasi moral yaitu evaluasi atas penyebab masalah. Keempat, saran penanggulangan masalah yaitu penawaran suatu cara penanganan masalah dan kemungkinan prediksi hasilnya. (Sobur, 2004)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik analisis *framing* Entman. Metode kualitatif tidak bergantung pada analisis statistik untuk mendukung sebuah interpretasi tetapi lebih mengarahkan peneliti untuk membuat sebuah pernyataan retorik atau argument yang masuk akal mengenai temuannya (Lindlof & Taylor, 2002). Teknik analisis framing Entman adalah pendekatan yang digunakan wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita, untuk menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut. (Eriyanto, 2002)

Metode ini digunakan untuk menganalisis berita Republika *online* mulai tanggal 17 Oktober hingga 17 November 2017 untuk diketahui isu apa yang diseleksi

kemudian ditonjolkan serta isu apa yang dihilangkan. Kemudian, akan diidentifikasi definisi masalah, sumber masalah, nilai moral, dan solusi yang dibingkai penulis berita.

Sehingga dapat diketahui cara Republika *online* dalam membingkai berita polemik pidato pelantikan Anies yang menyebutkan kata ‘Pribumi’

Hasil Penelitian

Republika *online* mengelompokkan berita tentang polemik pidato Anies yang menyebut kata pribumi menjadi 3 isu yaitu (1) dampak kontroversi kata pribumi dalam pidato pelantikan Anies, (2) tanggapan aparat terhadap laporan kelompok yang memprotes, (3) tanggapan dari tokoh nasional dan lembaga kepada Anies atas persoalan polemik pidato Anies :

Elemen yang pertama dalam framing dari Entman adalah pendefinisian masalah. Elemen ini adalah bingkai utama yang menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh penulis berita (Eriyanto, 2002).

Mulai dari 16 Oktober 2017 hingga 17 November 2017, Republika *online* mengangkat berbagai isu permasalahan seputar peristiwa polemik pidato ‘Pribumi’ Anies Baswedan saat pelantikan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dalam konteks peristiwa polemik pidato Anies Baswedan ini, Republika *online* telah mengeliminasi aspek-aspek tertentu yang layak menjadi perhatian pemberitaan dan yang tidak layak untuk diangkat. Adapun aspek-aspek yang menjadi perhatian adalah :

Isu dampak kontroversi kata pribumi dalam pidato pelantikan Anies. Berdasarkan analisis bingkai terhadap pemberitaan Republika *online* dalam kurun waktu 16 Oktober 2017 hingga 17 November 2017 Republika *online* mengetengahkan pemberitaan mengenai kontroversi kata ‘Pribumi’ yang

disebutkan Anies dalam pidato pelantikannya seperti yang ada pada edisi Senin, 16 Oktober 2017 dengan judul *Anies : Kolonialisme Dirasakan sehari-hari di Jakarta*. Pada tanggal 17 Oktober 2017, edisi *Pidato Lengkap Gubernur DKI Anies Baswedan dan Soal konteks pribumi di pidatonya, ini kata Anies*. Hal ini menimbulkan dampak konflik yakni ada kelompok-kelompok yang merasa tidak bisa menerima perilaku Anies yang menggunakan kata ‘Pribumi’ dalam pidatonya karena dianggap melanggar Inpres Nomor 26 Tahun 1998 yang melarang penggunaan kata ‘Pribumi’ dalam pelaksanaan pemerintahan serta dapat memicu konflik SARA. Aksi protes Barisan Muda Indonesia yang merupakan organisasi sayap Partai PDI-P menjadi awal pemicu kontroversi pidato Anies yang menggunakan kata ‘Pribumi’. Yang mana aksi protes ini ditunjukkan dengan perilaku melaporkan Anies ke Polda Metro Jaya. Kemudian dilanjutkan ke Bareskrim. Dalam edisi Selasa 17 Oktober 2017, *Soal Pidato ‘Pribumi’, Organisasi Sayap PDIP Laporkan Anies*. Pada edisi Senin 23 Oktober 2017 juga diangkat mengenai *Komunitas Anak Bangsa Protes Pidato ‘Pribumi’ Anies*.

Bisa diartikan bahwa Republika *online* mencoba membingkai peristiwa pelaporan Anies merupakan sikap ketidakrelaan Barisan Muda Indonesia (BMI) sebagai organisasi sayap Partai PDI-P terhadap kemenangan Anies dalam pemilu Gubernur DKI Jakarta sehingga melakukan aksi protes terhadap pidato pelantikan Anies.

Isu tanggapan aparat hukum terhadap laporan kelompok yang memprotes, permasalahan diksi ‘Pribumi’ dalam pidato Anies membuat Barisan Muda Indonesia melaporkannya ke Polda Metro Jaya karena dianggap melanggar UU 40/2008 dan Inpres Nomor Nomor 26 Tahun 1998. Dalam

edisi Rabu, 18 Oktober 2017 dengan judul ‘Soal Kata Pribumi, POLRI belum berencanan periksa Anies’. Tanggapan Bareskrim terhadap kasus Anies juga dimuat dalam pemberitaan ini karena permasalahan protes dari Barisan Muda Indonesia tidak mendapatkan lampu hijau, melainkan dilimpahkan untuk diberikan ke Bareskrim yang termuat dalam edisi Rabu 18 Oktober 2017 ‘Soal Kata Pribumi, POLRI belum berencana periksa Anies’, edisi Jumat 20 Oktober 2017 dengan judul *Bareskrim Masih Kaji Soal Laporan Pidato Pribumi Anies*. Dan pelaporan ini dilakukan sebanyak dua kali. Saat POLRI dan Bareskrim belum melakukan respon atau tindakan melakukan pemeriksaan Anies terkait pidatonya. Barisan Muda Indonesia kembali melaporkan Anies kepada Bareskrim yang dimuat dalam edisi Kamis 19 Oktober 2017 yang berjudul ‘Anies kembali dilaporkan ke Bareskrim POLRI’.

Penulis berita ini hendak membingkai peristiwa polemik pidato Anies ini dipicu aksi pelaporan Barisan Muda Indonesia yang merupakan organisasi sayap dari lawan partai pengusung Anies. Secara tidak langsung peristiwa ini dikesankan sebagai peristiwa pertarungan politik setelah pemilu Gubernur DKI Jakarta. Cara yang diambil adalah dengan usaha melakukan kriminalisasi kepada Anies dengan delik aduan penggunaan kata yang dilarang Undang-Undang dalam pidato pelatikkannya.

Isu dukungan dari tokoh nasional dan lembaga kepada Anies atas persoalan polemik pidato Anies. Semenjak muncul pemberitaan tentang kontroversi ini, *Republika online* mencoba mengangkat realitas tentang protes kelompok Barisan Muda Indonesia. Diangkatnya realitas ini sebagai masalah memicu tanggapan dari banyak tokoh nasional yang menyampaikan pendapatnya yang mana secara tidak langsung mereka tidak

mempermasalahkan pidato dari Anies. Pada edisi Selasa 17 Oktober 2017 ada berita yang berjudul ‘Kontroversi Pribumi, Agus : Beri Kesempatan Anies Bekerja’ bingkai yang ingin dibentuk penulis atas peristiwa ini pada benak pembaca adalah ketidakrelaan pihak lawan Anies dalam pemilu Gubernur kemarin yang memunculkan sikap berusaha menghambat Anies melakukan tugasnya merealisasikan kinerjanya sebagai Gubernur DKI Jakarta, ‘Kata Pribumi HNW Bela Anies Baswedan’, ‘Luhut : Enggak ada Pribumi dan Nonpribumi’ pada 18 Oktober 2017 Wakil ketua DPR juga menyatakan pada berita yang berjudul ‘Wakil Ketua DPR : Akhir Polemik ‘Pribumi’ di Pidato Anies, ‘Soal Pribumi, Jimly : Sebagai Pidato Politik Boleh Saja’. ‘Mahfud : Secara hukum penyebutan pribumi tidak ada masalah’ di edisi 19 Oktober 2017.

Dan secara tidak langsung, penulis *Republika online* mengajak pembaca untuk memiliki persepsi atas peristiwa ini bahwa pembaca atau masyarakat tidak perlu ikut-ikutan mempermasalahkan kasus ini karena ini hanya bentuk ketidakrelaan pendukung lawan politik Anies dalam pemilu kemarin yang mengalami kekalahan.

Sehingga, penulis berita *Republika online* mencoba mendefinisikan masalah kasus pidato Anies dengan membangun bingkai peristiwa ini hanyalah upaya pihak lawan politik Anies yang menginginkan Anies mendapatkan citra yang buruk di mata masyarakat sehingga masyarakat menjadi tidak suka kepadanya. Hal ini diakibatkan kandidat yang diusung organisasi yang melaporkan tersebut mengalami kekalahan sehingga mereka masih belum rela jika Anies yang memimpin DKI Jakarta. Alhasil, muncullah upaya kriminalisasi dengan menggunakan isu SARA melalui diksi ‘Pribumi’ dalam pidato pelantikan Anies.

Analisa Kasus

Menurut Entman, setiap realitas yang ditonjolkan oleh media dalam membingkai realitas tentunya karena dilatar belakangi suatu penyebab. Penyebab ini bisa berupa siapa (*who*) dan bisa juga penyebab itu berupa apa (*what*) (Eriyanto, 2002).

Permasalahan yang diulas oleh *Republika online* memiliki latar belakang permasalahan yang dapat diperkirakan dengan melihat siapa yang menjadi penyebab masalah atau apa yang menyebabkan masalah dalam pemberitaan. Penyebab permasalahan kasus ini diungkapkan beberapa pemberitaan sebagai berikut :

Pada **isu dampak kontroversi kata pribumi dalam pidato pelantikan Anies** *Republika Online* mencoba membangun bingkai bahwa yang menjadikan ini masalah adalah Barisan Muda Indonesia yang merupakan organisasi sayap partai pengusung lawan Anies dalam pemilu Gubernur. Mereka memprotes penggunaan kata pribumi dalam pidato Anies karena dianggap melanggar Inpres Nomor 26 Tahun 1998 yang berisi larangan menggunakan kata pribumi dan non pribumi dalam penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, hingga penyelenggaraan pemerintah. Seperti yang ada pada edisi Selasa 17 Oktober 2017, *Soal Pidato 'Pribumi', Organisasi Sayap PDIP Laporkan Anies*. Pada edisi Senin 23 Oktober 2017 juga diangkat mengenai *Komunitas Anak Bangsa Protes Pidato 'Pribumi' Anies*.

Sedangkan pada **isu tanggapan aparat hukum terhadap laporan kelompok yang memprotes** *Republika online* mencoba menojolkan kasus ini bukanlah karena Anies yang menggunakan kata yang salah dan melanggar hukum. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan POLRI yang menjawab bahwa belum ada pemeriksaan kepada Anies. Secara bingkai hendak menyiratkan bahwa ini bukan

masalah yang penting untuk ditindak. Hal ini dimuat pada edisi Rabu 18 ktober 2017 dengan judul '*Soal Kata Pribumi, POLRI belum berencana periksa Anies*' Saat ada pelaporan kembali untuk yang kedua kali, bareskrim barulah mengeluarkan wacana bahwa bareskrim masih akan mengkaji soal laporan bukan langsung menindak tegas laporan tersebut seperti yang ada di edisi Jumat 20 Oktober 2017 dengan judul '*Bareskrim masih kaji soal laporan pidato pribumi Anies*'.

Dari sini kita bisa melihat bahwa penulis mencoba mengarahkan pembaca bahwa yang menjadi penyebab masalah atas peristiwa ini adalah Barisan Muda Indonesia yang berusaha melaporkan Anies dengan tuduhan pelanggaran hukum.

Pada **isu tanggapan dari tokoh nasional dan lembaga kepada Anies atas persoalan polemik pidato Anies**. Beberapa tokoh masyarakat tingkat Nasional menyatakan bahwa kata 'Pribumi' dalam pelantikan Anies itu sesungguhnya tidak ada yang salah jika kita melihat konteks pidatonya. Jusuf Kalla mengatakan bahwa konteks pidato itu menggambarkan zaman penjajahan dahulu sehingga tidak ada permasalahan. Mahfud MD pun selaku dosen hukum dan mantan Ketua MK berpendapat sama yakni tidak ada pelanggaran hukum dalam pidato Anies yang mengatakan kata 'Pribumi' seperti yang ada di edisi Kamis 19 Oktober 2017 dengan judul *Mahfud MD ; Secara Hukum Penyebutan Pribumi Tidak Ada Masalah*'. Sehingga bagi mereka ini bukanlah permasalahan. Yang menjadi permasalahan adalah adanya kelompok yang keliru dalam menafsirkan kata 'Pribumi' dalam pidato keseluruhan Anies sehingga kurang sesuai penafsirannya dengan konteks sebenarnya seperti judul '*JK : Pidato Anies Soal Pribumi Sesuai Kontesknnya*' pada edisi Selasa 17 Oktober 2017.

Jika kita menganalisa bingkai berita yang dikonstruksi oleh *Republika online* maka akan nampak yang menjadi penyebab permasalahan munculnya kontroversi ini bukanlah Anies yang menggunakan kata ‘Pribumi’ di dalam pidatonya yang dianggap melanggar Inpres Nomor 26 Tahun 1998 yang melarang penggunaan kata ‘Pribumi’ dalam pelaksanaan pemerintah dan sebagainya. Melainkan penyebab masalahnya adalah Barisan Muda Indonesia sebagai organisasi sayap partai oposisi Anies yang tidak rela Anies memimpin DKI Jakarta sehingga berupaya mencari kesalahannya. Seandainya Barisan Muda Indonesia tidak melakukan aksi protes dan melaporkan Anies kepada aparat hokum maka tidak ada pihak yang mempermasalahkannya hingga diliput oleh media.

Penulis berusaha membangun persepsi pembaca bahwa penyebab masalahnya bukan Anies melainkan Barisan Muda Indonesia. Hal ini terlihat dari penulisan kata Barisa Muda Indonesia merupakan organisasi sayap partai PDI-P yang merupakan partai pengusung lawan politik Anies dalam pemilu Gubernur yang lalu. Kesan yang ingin ditonjolkan adalah karena mereka kalah, maka mereka ingin menjatuhkan citra Anies saat menjabat dengan cara mencari kesalahan Anies dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang.

Penilaian Moral

Membuat pilihan moral adalah elemen framing yang dipakai untuk membenarkan argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Jika masalah sudah didefinisikan maka kita perlu menentukan penyebabnya lalu dibutuhkan dukungan argumentasi yang dikutip menggunakan bahasa yang familiar dan dikenal khalayak (Eriyanto, 2002). *Republika online* dalam melakukan pbingkai terhadap peristiwa polemik pidato Anies turut

memberikan sejumlah penilaian moral atau evaluasi moral terhadap penyebab berbagai masalah yang diketengahkan dalam pemberitaan :

Isu dampak kontroversi kata pribumi dalam pidato pelantikan Anies, dalam berita yang mbingkai peristiwa kontroversi kata Pribumi dalam pidato Anies, *Republika online* memberikan penilaian moral bahwasanya Barisan Muda Indonesia adalah orang-orang yang belum memahami betul bagaimana konteks pidato Anies melainkan hanya memotong sepenggal saja. Seharusnya mereka memahami konteks pidato Anies secara menyeluruh. Sehingga tidak mencari-cari kesalahan Anies. Hal ini diulas pada edisi Selasa 17 Oktober 2017 dengan judul ‘*JK ; Pidato Anies Soal Pribumi Sesuai Konteksnya*’, ‘*Soal konteks pribumi di pidatonya, ini kata Anies*’, ‘*Pidato Lengkap Gubernur DKI Anies Baswedan*’, ‘*Mengapa kata pribumi begitu sensitive*’ pada edisi 18 Oktober 2017. ‘*Belanda sebut pribumi inlander, keturunan arab hargai pribumi sebagai saudara*’. Secara tidak langsung penulis ingin memberikan kesan bahwa Barisan Muda Indonesia adalah orang-orang yang cepat menyimpulkan suatu perkara atau emosional karena terbawa masalah pemilu kemarin.

Isu tanggapan aparat hukum terhadap laporan kelompok yang memprotes. Dalam pbingkai berita tanggapan aparat hukum terhadap laporan kelompok yang memprotes juga tersirat penilaian moral bahwasannya yang melakukan protes sebenarnya melaporkan kejadian yang tidak terlalu *urgent* sehingga aparat hukum juga tidak segera merespon laporan yang mereka berikan. Ini dimuat di edisi ‘*Soal Kata Pribumi, POLRI belum berencana periksa Anies*’ Rabu 18 Oktober 2017. Dan edisi Kamis 19 Oktober 2017 pada judul ‘*Anies Kembali dilaporkan ke*

Bareskrim POLRI. Dengan kata lain, penulis hendak menyampaikan kepada pembaca bahwa aparat hukum secara tidak langsung mengajak Barisan Muda Indonesia untuk tidak memperpanjang masalah ini karena secara dampak justru akan bisa membuat perpecahan.

Isu tanggapan dari tokoh nasional dan lembaga kepada Anies atas persoalan polemik pidato Anies. Kebanyakan para tokoh politik nasional menyampaikan bahwasannya tidak ada permasalahan dengan pidato Anies karena masih sesuai konteksnya. Justru yang menjadi negatif Barisan Muda Indonesia yang berusaha memecah belah masyarakat melalui isu ini. Seperti yang ada di edisi Kamis 19 Oktober 2017 dengan judul *Mahfud MD ; Secara Hukum Penyebutan Pribumi Tidak Ada Masalah*. Dan judul *JK : Pidato Anies Soal Pribumi Sesuai Kontesknnya* pada edisi Selasa 17 Oktober 2017.

Dalam pembedingkaian berita di *Republika Online* ini justru nilai moral yang diangkat adalah Anies sebagai tokoh yang ingin menunjukkan bahwa banyak warga Jakarta yang dulunya menjadi korban penjajahan, sehingga kini layak mendapatkan kemerdekaan. Anies dikesankan sebagai tokoh pemersatu rakyat Jakarta yang terdiri dari banyak suku, ras dan agama. Sebaliknya, Barisan Muda Indonesia justru mendapatkan penilaian moral sebagai orang yang berusaha menjatuhkan Anies, dengan membuat isu SARA untuk memecah warga Jakarta karena belum rela kalah dari Anies.

Rekomendasi Penyelesaian Masalah

Dari serangkaian berita yang diangkat, penulis memiliki suatu keinginan akhir mengenai cerita yang disusun melalui bingkai-bingkai peristiwa dalam berita ini. Yang pada akhirnya diwujudkan dalam sebuah penyelesaian masalah. Jalan yang akan dipilih

oleh penulis berita untuk menjadi penyelesaian masalah (Eriyanto, 2002).

Dalam hal ini *Republika online* juga memberikan beberapa saran penyelesaian masalah untuk mengatasi masalah polemik ‘Pribumi’ Anies yang terangkum dalam beberapa pemberitaan sebagai berikut :

Isu dampak kontroversi kata pribumi dalam pidato pelantikan Anies, pada pembedingkaian berita yang mengangkat isu ini, banyak disampaikan bahwa tidak perlu lagi mempersoalkan kata ‘pribumi’ yang ada dalam pidato Anies, karena sesungguhnya itu bukanlah pelanggaran hukum, dan tidak ada niatan untuk melakukan diskriminasi terhadap etnis tertentu. Karena itu murni pidato politik saat pelantikan. Hal ini termuat dalam edisi *JK : Pidato Anies Soal ‘Pribumi’ sesuai konteknya* di edisi Selasa 17 Oktober 2017. Ada juga yang mengatakan bahwa penyelesaiannya adalah dengan memberikan kesempatan kepada Anies untuk bekerja terlebih dahulu untuk membuktikan kinerja dan karyanya. Karena akan terlihat dari sana apakah memang dia disriminasi atau tidak yang termuat dalam edisi Selasa 17 Oktober 2017 dengan judul *‘Kontroversi pribumi , Agus : Beri Kesempatan Anies Bekerja’*. Dan Mahfud MD selalu mantan Ketua MK dan dosen Ilmu Hukum juga tidak memperlmasalah pidato itu sehingga tidak perlu diprotes atau diselesaikan aparat hukum yang termuat dalam edisi Kamis 19 Oktober 2017 dengan judul *‘Mahfud : Secara Hukum Penyebutan Pribumi Tidak Ada Masalah’*

Isu tanggapan aparat terhadap laporan kelompok yang memprotes, penyelesaian POLRI adalah tidak menanggapi protes kelompok barisan muda Indonesia yang telah mengajukan laporan bahwa Anies melanggar Inpres dengan mengatakan kata ‘Pribumi’ yang termuat dalam edisi *‘Soal Kata Pribumi, POLRI belum berencana periksa Anies’* Rabu

18 Oktober 2017 secara tidak langsung hendak membingkai bahwa aparat hukum menganggap penyelesaiannya adalah dengan tidak terlalu menanggapi aksi protes tersebut karena dirasa bukan masalah yang melanggar hukum. Bahkan Barisan Muda Indonesia sampai melaporkan dua kali ke POLRI dan Bareskrim namun juga masih dibingkai bahwa aparat hukum melakukan tindakan diam atau tidak memeriksa terlebih dahulu karena belum dianggap permasalahan pelanggaran hukum.

Isu tanggapan dari tokoh nasional dan lembaga kepada Anies atas persoalan polemik pidato Anies. Dari beberapa tokoh nasional, *Republika online* membingkai bahwasannya banyak yang berpendapat mendukung Anies seperti ACTA dan PWNU yang menyampaikan bahwa tidak ada persoalan dengan pidato Anies. Hal itu diungkapkan pada edisi Sabtu 21 Oktober 2017 dengan judul *'PWNU Jakarta Bela Anies Soal Penggunaan Istilah Pribumi'* yang juga ditambahi oleh putri GusDur yakni Yenny Wahid dengan judul *'Soal Pidato Pribumi Anies, Ini Kata Putri GusDur'* di edisi Kamis, 19 Oktober 2017, *'Suropati Syndicate: Pribumi Maksud Anies Bukan Memecah Belah'* pada edisi Jumat 20 Oktober 2017. Sedangkan untuk tokoh nasional yang secara personal mendukung baik langsung maupun tidak langsung memberikan tanggapan yang dibingkai oleh *Republika online* sebagai solusi untuk tidak melanjutkan pembahasan pidato Anies karena tidak ada masalah. Pada edisi Selasa 17 Oktober 2017 ada berita yang berjudul *'Kontroversi Pribumi, Agus : Beri Kesempatan Anies Bekerja'* secara tidak langsung pendapat Agus dibingkai oleh *Republika online* menjadi sebuah realitas solusi atas masalah pidato Anies bahwa biarkan Anies diberikan kesempatan menunjukkan kinerjanya terlebih dahulu dan kita hentikan saja aksi protes ini karena dianggap akan tidak produktif

dan justru merugikan rakyat karena mereka menjadi terhambat kinerjanya, *'Kata Pribumi HNW Bela Anies Baswedan'* pada berita ini HNW dibingkai menjadi orang yang membela Anies karena Anies tidak melakukan kesalahan dalam pidatonya dan sebagai anggota partai PKS yang menjadi partai pengusung Anies HNW secara tegas memberikan solusi bahwa tidak perlu menyalahkan Anies, *'Luhut : Enggak ada Pribumi dan Nonpribumi'* pada 18 Oktober 2017 Wakil ketua DPR juga menyatakan pada berita yang berjudul *'Wakil Ketua DPR : Akhir Polemik 'Pribumi' di Pidato Anies, 'Soal Pribumi, Jimly : Sebagai Pidato Politik Boleh Saja'* *Republika online* menyampaikan bahwa penggunaan kata Pribumi Anies sah-sah saja karena konteksnya adalah konteks pidato politik yakni saat mereka Anies melakukan pidato pelantikan sebagai Gubernur DKI Jakarta bukan dalam rangka melaksanakan program pemerintahan atau berniat menyulut SARA. *'Mahfud : Secara hukum penyebutan pribumi tidak ada masalah'* di edisi 19 Oktober 2017 juga membingkai bahwa solusi dari masalah ini adalah menganggap kasus ini bukanlah kasus pelanggaran hukum karena tidak ada tendensi mendeskreditkan etnis tertentu saat menyebut pribumi dalam pidato pelantikannya melainkan untuk menjelaskan konteks penjajahan Belanda saat jaman dahulu.

Dari penjelasan empat elemen framing Entman yang digunakan untuk mengulas berita polemik pidato Anies pada *Republika online* kita bisa melihat bahwa penulis berita mencoba untuk membangun sebuah bingkai di benak para pembaca, yakni : (1) penulis mendefinisikan bahwa masalahnya utamanya bukanlah Anies yang menggunakan kata 'Pribumi' melainkan masalah politik antara partai pengusung lawan politik Anies setelah mengalami kekalahan dengan Anies. Mereka

mencoba menggunakan Barisan Muda Indonesia untuk melakukan upaya kriminalisasi kepada Anies. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak ingin dipimpin oleh Anies. (2) pendefinisian masalah ini penyebabnya adalah Barisan Muda Indonesia yang digerakkan oleh partai PDI-P akibat kekalahan Ahok-Djarot. Seandainya Ahok yang menang maka Anies tidak akan diprotes oleh Barisan Muda Indonesia. Maka Barisan Muda inilah yang menjadi penyebabnya, bukan Anies. (3) dari penyebab masalah ini, penulis membangun suatu penilaian moral kepada Barisan Muda Indonesia yang ditujukan kepada penggerak dibalikinya bahwa merekalah yang justru hendak memecah rakyat Jakarta dengan isu SARA bukan Anies. (4) maka penyelesaian masalah yang diberikan penulis adalah dengan menunjukkan saran dari beberapa tokoh nasional, lembaga nasional dan aparat hukum untuk tidak mempermasalahkan kasus ini kembali karena tidak melanggar hukum manapun, biarkan Anies memimpin Jakarta dan menunjukkan kinerjanya terlebih dahulu.

Berdasarkan diskusi mengenai analisis framing berita polemik Anies, pembentukan framing seperti ini tentunya tidak lepas dari latar belakang penulis dan media yang mengangkat isu ini yakni *Republika online* yang notabene merupakan media massa *online* yang dimiliki oleh salah satu partai pengusung Anies dalam pemilu Gubernur DKI Jakarta kemarin yakni PKS. Itulah yang menyebabkan realitas peristiwa ini dikonstruksikan bahwa Anies bukanlah penyebab polemik ini, melainkan lawan politiknya yang salah yakni partai PDI-P melalui organisasi sayapnya yakni Barisan Muda Indonesia yang melaporkan Anies. Seperti yang dikatakan oleh orang yang berpandangan konstruktivis sosial bahwa kebenaran terletak pada pikiran manusia atau subjektif yang mengamati realitas. Kebenaran

dibentuk oleh penulis berita bukan pada realitasnya. Sehingga *Republika online* pun membentuk kebenaran sesuai dengan kepentingannya.

Kesimpulan

Pelantikan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta membuat Anies harus menyampaikan pidato pelantikannya kepada semua rakyat Jakarta yang disiarkan dan diliput berbagai media di Tanah Air. Dalam pidatonya, Anies sempat mengatakan kata ‘Pribumi’ sebanyak tiga kali saat menceritakan sejarah rakyat Jakarta di masa lalu yang mengalami penjajahan dan penindasan para penjajah. Kata ‘Pribumi’ ini lantas memicu kontroversi. Barisan Muda Indonesia yang merupakan organisasi sayap PDI-P menganggap kata ‘Pribumi’ merupakan metafora untuk menyinggung etnis tertentu di Jakarta. Hingga akhirnya Barisan Muda Indonesia mengambil tindakan melaporkan Anies ke Polda Metro Jaya. Namun Polda Metro Jaya tidak mau mengambil tindakan dan menyarankan untuk melaporkannya ke Bareskrim. Barisan Muda Indonesia pun melaporkan ke Bareskrim namun hingga kini masih belum ada penanganan. Beberapa tokoh nasional seperti Jusuf Kalla, Luhut, Jimly, Hidayat Nur Wahid, Mahfud MD, serta beberapa kelompok seperti ACTA dan PWNU menyatakan bahwa pidato Anies tidak ada hal yang harus dipermasalahkan. Polemik ini masih terus hangat diperbincangkan di media massa untuk menghadirkan realitas yang sesuai dengan perspektif media yang bersangkutan dimata pembacanya.

Republika online adalah media yang tergolong besar di Indonesia yang juga ikut memberitakan kontroversi polemik pidato ‘Pribumi’ Anies. Konstruksi realitas yang dihadirkan media *Republika online* jika di analisis menggunakan analisis bingkai model

Entman adalah bentuk dukungan kepada Anies atas permasalahan ini. Anies bukanlah penyebab masalah, karena masalah ini hanya sekedar ketidakrelaan lawan politik Anies melihatnya menjabat Gubernur DKI Jakarta. Sehingga, mereka berupaya menjatuhkannya melalui kasus ini. Merekalah yang justru melakukan upaya memecah belah masyarakat dengan isu SARA. Maka dari itu, *Republika online* melalui penulis menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak lagi memperlakukan kasus ini karena sejatinya tidak mengandung unsur pelanggaran hukum melainkan hanya upaya kriminalisasi Anies semata.

Daftar Pustaka

Budhy S, Ariyanto. Subagyo. (2013). Cynthia Putri. *Konstruksi Media On-line terhadap Peristiwa Pengungsi Rohingya*. Jurnal Komunikasi Massa Volume 6 No.2, Juli 2013 : 189-202

Eriyanto. (2011). *Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, Yogyakarta : LKiS,

Littlejohn, Stephen W. (2009). *Theories of Human Communication, ninth edition*, Belmont : Wadsworth.

Poloma, M. (1994). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Sobur, A. (2004). *Analisis Teks Media : Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*. Bandung : Remaja Rosda Karya

West, Richard & Turner, Lynn H, 2007, *Introducing Communication Theory Analysis and Application, third edition*, Mc Graw Hill, New York.

<http://karakterbangsa.net/Latest/pengertian.htm>
diakses tanggal 10 November 2017

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/10/17/oxyprm0330-kontroversi->

[pribumi-agus-beri-kesempatan-anies-bekerja](http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/17/10/23/oy9mt0330-komunitas-anak-bangsa-protos-pidato-pribumi-anies) diakses tanggal 10 November 2017

[http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/17/10/23/oy9mt0330-komunitas-anak-bangsa-protos-pidato-pribumi-anies](http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/10/17/oxybml354-kata-pribumi-dipersoalkan-hnw-bela-anies-baswedan) diakses tanggal 10 November 2017

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/10/17/oxybml354-kata-pribumi-dipersoalkan-hnw-bela-anies-baswedan> diakses tanggal 10 November 2017

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/17/10/20/oy31es327-suropati-syndicate-pribumi-maksud-anies-bukan-memecah-belah> diakses tanggal 10 November 2017

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/10/18/oxzu0t409-acta-siap-bela-anies-soal-pidato-pribumi> diakses tanggal 10 November 2017

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/10/20/oy4fad409-bareskrim-masih-kaji-laporan-pidato-pribumi-anies> diakses tanggal 10 November 2017

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/10/19/oy2r20354-anies-kembali-dilaporkan-ke-bareskrim-polri> diakses tanggal 10 November 2017

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/10/17/oxz14n409-soal-pidato-pribumi-organisasi-sayap-pdip-laporkan-anies> diakses tanggal 10 November 2017

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/10/18/oy0a20354-wakil-ketua-dpr-akhir-polemik-pribumi-di-pidato-anies> diakses tanggal 10 November 2017

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/17/10/18/oy019p384-soal-kata-pribumi-polri-belum->

berencana-periksa-anies diakses tanggal 10 November 2017

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/17/10/22/oy5x9d377-pwnu-jakarta-bela-anies-soal-penggunaan-istilah-pribumi> diakses tanggal 10 November 2017

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/10/17/oxyp7o330-jk-pidato-anies-soal-pribumi-sesuai-konteksnya> diakses tanggal 10 November 2017

<http://www.republika.co.id/berita/video/berita/17/10/18/oy0vaw216-soal-pribumi-jimly-tak-masalah> diakses tanggal 10 November 2017

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/17/10/19/oy14z3377-soal-pidato-pribumi-anies-ini-kata-putri-gus-dur> diakses tanggal 10 November 2017

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/10/17/oxycet330-luhut-enggak-ada-pribumi-dan-nonpribumi> diakses tanggal 10 November 2017

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/10/17/oxyc4j396-soal-konteks-pribumi-di-pidatonya-ini-kata-anies> diakses tanggal 10 November 2017

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/17/10/17/oxykl3384-soal-pidato-anies-jk-lihat-konteksnya> diakses tanggal 10 November 2017

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/10/19/oy2b4p409-bareskrim-terima-laporan-polisi-terhadap-anies-tetapi> diakses tanggal 10 November 2017

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/17/10/16/oxx5wn428-anies-kolonialisme-dirasakan-seharihari-di-jakarta> diakses tanggal 10 November 2017